

**KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU OLEH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011**

**EDI KURNIAWAN
ERMAN M**

Edykurniawan@yahoo.com

085278849706

ABSTRACT

Purpose of this study was to determine how the coordination is done by the regional disaster management agencies and social services in the flood disaster in the upper left Kampar district in 2011. Whereas the method used is a qualitative research method, wherein the method is shown to the research procedures which produce qualitative file that the observed expression ornotes.

The results of this study provide input and advice to government agencies related to the Kampar district disaster management, in this case the implementation of the coordination functions performed by local disaster management agencies (BPBD) and social services Kampar district in flood disaster management in the upper left Kampar district, 2011.

Conclusion of this study is disastrous management body regions and social services Kampar district has not implemented optimally in coordinating the implementation of the flood disaster that occurred in the upper left Kampar district, with a variety of inhibiting factors such as, the difficulty of meeting or meetings, the lack of joint work programs and communication intensity is low, so that the coordination between regional disaster management agencies and social services are not fuplly implemented.

Keywords : Coordination, Communication, Cooperation.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Studi ini mencoba untuk melihat persoalan penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011 sebagai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Penanggulangan bencana seyogianya merupakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial, oleh sebab itu fokus yang ingin dikaji adalah pada persoalan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas sosial Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana banjir yang melanda Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tahun 2011.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki tugas pokok sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana, selain itu juga berperan sebagai koordinator dan juga sebagai pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah. Sedangkan Dinas Sosial sebagai *leading sector* dalam penyerahan bantuan dan tanggap darurat paska bencana, seperti pemberian logistik untuk pangan serta mendirikan posko tanggap bencana mulai dari dapur umum, pos kesehatan dan lain sebagainya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan Dinas Sosial dibentuk melalui Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pasal 20 mengatakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggung pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan sentral pada evakuasi dan proses analisis terhadap bencana sedangkan Dinas Sosial berperan pada penyediaan berbagai fasilitas pokok pasca bencana. Adapun Definisi tentang bencana berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan definisi itu dapat dilihat bahwa peran kedua institusi begitu penting dalam penanggulangan bencana alam khususnya soal penanggulangan

bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu tahun 2011. Harian pagi Riau Pos (29/11-2011) memberitakan bahwa Pemerintah khususnya BPBD dan Dinas Sosial kurang tanggap terhadap bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, justru bantuan datang lebih cepat dari pihak swasta seperti Sinarmas Forestry Peduli Banjir melalui PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) dan lain-lain dalam artian bahwa kepedulian justru datang lebih cepat dari pihak swasta dan swadaya masyarakat.

Selain itu berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas sosial menyebutkan bahwa banjir tersebut mengakibatkan berbagai kerugian terhadap masyarakat yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, diantaranya; hanyutnya rumah warga, rusaknya perkebunan, matinya peliharaan ternak dan juga merenggut korban jiwa, banjir yang terjadi selama 4 hari itu sangat memberikan pelajaran penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam tanggap darurat bencana yang terjadi pada Tahun 2011.

Tabel: 1.1 Desa yang terdampak Banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011

No	Desa Terdampak
1	Aur Kuning
2	Subayang Jaya
3	Gajah Bertalut
4	Tanjung Beringin
5	Batu Sanggan
6	Muoro Bio
7	Tanjung Belit
8	Pangkalan Serai
9	Terusan
10	Tanjung Belit Selatan
Jumlah = 10 Desa	

Sumber: BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar tahun 2011

Lokasi yang terdampak banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu pada tahun 2011 dalam tabel diatas yang sepanjang aliran sungai subayang antara lain desa yang terdampak, Desa Aur Kuning, Subayang Jaya, Gajah Bertalut, Tanjung Beringin, Batu Sanggan, Muoro Bio, Tanjung Belit, Pangkalan Serai, Terusan, Tanjung Belit Selatan. Menurut pemberitaan (Riau Pos 29/11-2011) adapun penyebab banjir bandang ini terjadi karena hujan deras yang turun terus menerus dan mengakibatkan naiknya permukaan air aliran Sungai Subayang dan Sungai Bio dengan ketinggian air mencapai 8 meter yang melanda sepanjang hamparan sungai di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Tabel 1.2 Data Kerusakan dan Korban Jiwa Akibat Banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011

No	Akibat	Jumlah
1	Korban Jiwa	2 Orang
2	Kerusakan Rumah Warga	260 Rumah
3	Rumah Hanyut	21 Rumah
4	Kehilangan Karet	79,9 Ton
5	Kerusakan Perkebunan Karet	33 Ha
6	Kehilangan Perahu	53 Unit
7	Kerusakan Jembatan	4 Unit

Sumber : BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar tahun 2011

Berdasarkan data BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar di atas, dapat di jelaskan bahwa bencana banjir itu mengakibatkan 2 (dua) orang warga tewas yaitu warga di Desa Gajah Bertalut, kemudian kerusakan pada rumah warga yang terendam sebanyak 260 Kartu Keluarga atau sebanyak (1.149 jiwa), begitu juga rumah yang hanyut sebanyak 21 rumah, kehilangan karet masyarakat sebanyak 79,9 ton, kerusakan perkebunan karet sebanyak 33 Ha, kehilangan perahu sebanyak 53 Unit, dan kerusakan jembatan sebanyak 4 Unit jembatan. Kondisi banjir yang melanda Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini merupakan bencana banjir terbesar dan banyak meninggalkan kerugian bagi masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Tabel 1.3 Bantuan Dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kampar

No	Jenis Bantuan	Jumlah
1	Perahu Karet Bermotor	3 Unit
2	Perahu piber	1 Unit
3	Beras	25 Ton
4	Sandang	1 Keg
5	Beras	100 Ton
6	Dapur Umum	1 keg

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kampar tahun 2011

Berdasarkan dari tabel di atas dalam hal ini bantuan yang diturunkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui data Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Dari pemerintah Provinsi, perahu karet bermotor 3 unit, perahu piber 1 unit melalui Dinas Sosial Provinsi, beras sebanyak 25 Ton, sandang 1 kegiatan, kemudian dari Pemerintah Kabupaten Kampar beras sebanyak 100 Ton, sembako untuk dapur umum dan 4 ton untuk rawan pangan.

Berkaitan dengan itu, penanggulangan bencana hendaknya dipahami tidak hanya sebatas evakuasi dan analisis pasca bencana, akan tetapi lebih dari itu yakni pada aspek pencegahan terhadap bencana. Oleh karena itu memang koordinasi antar institusi dalam pencegahan dan koordinasi antar institusi pasca musibah menjadi sangat penting. Terjadinya bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tahun 2011 masih menyisakan beragam persoalan

diantaranya; belum selesainya proses identifikasi kerugian baik materil maupun non materil, belum adanya bentuk antisipasi lanjutan dan belum jelasnya mekanisme pengembalian pengungsi dari tempat penampungan hingga saat ini, hingga banyak diantara pengungsi yang masih belum mendapatkan tempat tinggal pengganti yang layak. Dalam kaitan dengan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Kampar sudah mengalokasikan anggaran untuk bencana yang dihimpun dalam kebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Kampar sejak tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Alokasi Anggaran Bencana Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2009-2011

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Keterangan
1	2009	1.695.000.000	Anggaran tidak termasuk anggaran dinas/badan
2	2010	2.567.000.000	Peningkatan anggaran disebabkan banjir pada tahun tersebut
3	2011	3.895.000.000	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal penanggulangan bencana terus meningkatkan anggaran daerah untuk penanggulangan bencana. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Dengan demikian sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak siap dalam menghadapi bencana terutama bencana banjir yang terjadi di Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Selain itu, belum selesainya persoalan penanggulangan bencana banjir diduga karena belum berjalannya koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi pada tahun 2011 yang lalu. Akibatnya adalah korban banjir terlantar, meskipun bantuan dari berbagai pihak berdatangan namun langkah konkrit dari kedua institusi menjadi sangat penting dalam mengatasi masalah ini.

2. Kerangka Teori

Sehubungan dengan masalah koordinasi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat para ahli diantaranya yang dikemukakan oleh Leonard D. White dalam Inu Kencana Syafii (1998 : 41) menyatakan bahwa "*Coordination is the adjustment of the part of each other, of the movement and operation of the part in time so that each can make its maximum contribution to the product of the whole* . Artinya, koordinasi adalah menyesuaikan diri dengan bagian-bagian satu sama lain dengan gerakan serta pekerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan maksimum pada hasil secara keseluruhan.

Selanjutnya James D. Money dalam Inu Kencana Syafii (1998:41) yang mengemukakan "*Coordination, therefore, is the orderly arrangement of group*

effort, to provide unity action in the pursuit of a common purpose”, yang artinya bahwa koordinasi adalah pengetahuan sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama. Menurut Soewarno Hadiningrat (2000 : 88) koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Menurut Bayu Suryaningrat (1989 : 111) istilah Koordinasi (*coordination*) berasal dari bahasa Latin *co* yang berarti bersama-sama atau dengan orang lain, dan *ordinare* yang berarti mengatur. Dengan demikian, *coordination* mengatur bersama, tetapi pengertian yang umum ialah, penyamaan tahap atau pengaturan menjadi sama, bekerja sama secara harmonis, menghubungkan satu sama lain, menempatkan secara berdampingan, penyesuaian dan pengaturan yang baik.

Menurut (George R Terry dalam Bayu Suryaningrat : 1989) koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang dipimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Herbert A. Simon dalam Ateng Syafrudin : 1993) Koordinasi adalah keefektifan seseorang dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan dalam setiap suasana sosial, tidak hanya bergantung pada aktivitasnya sendiri, tetapi juga pada bagaimanakah hubungan aktivitasnya itu dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang lain. Koordinasi dapat dihubungkan dengan fungsi kekuasaan, artinya koordinasi diarahkan pada perbuatan oleh semua kelompok keputusan yang sama atau lebih tepat, keputusan yang saling bersuasain dalam kombinasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut T. Hani Handoko (2003 : 195) Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Menurut Handoko kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.

Menurut Stoner dalam Tangkilisan, Hessel Nogi (2004 : 72) koordinasi adalah proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sementara itu menurut Sedangkan menurut Brech dalam Hasibuan (2007 : 85) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

3. Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka pertanyaan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana banjir di kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana banjir di kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011.
2. Apa saja Faktor-faktor yang menghambat koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kampar dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011.

4.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini mengarah pada 2 aspek :

1. Aspek Praktis
Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemecah masalah yang berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Serta diharapkan mampu menjadi acuan bagi formulasi koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
2. Aspek Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan teoritis dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan koordinasi.

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Menggali informasi atau keterangan langsung dari informan dilakukan untuk mengetahui sejauhmana koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua

pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

b. Dokumentasi

Yaitu setiap bahan yang tertulis atau dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu. Data-data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait antara lain Buku, Jurnal, dari Kantor Dinas Sosial, BPBD, Kantor Camat Kampar Kiri Hulu, Desa Aur Kuning, Desa Subayang Jaya, Sumber Internet, Pemberitaan Media Massa dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan data lain berupa studi literatur yang sangat mendukung penulisan ini terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

b. Data sekunder yaitu data yang sudah jelas dan tersedia yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini, meliputi: buku-buku, laporan bencana banjir bandang, undang-undang, dan peraturan daerah terkait penanggulangan bencana.

3. Analisis Data

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu membahas fenomena yang telah terjadi kemudian membandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan, yaitu kriteria yang menjadi tujuan, selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dengan kata lain koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari instansi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif, tanpa koordinasi orang akan kehilangan pandangan terhadap peranya dalam organisasi secara total dan akan tergoda untuk mendahulukan kepentingan instansi mereka masing-masing dan mengorbankan secara organisasi. Seberapa jauh koordinasi yang diperlukan tergantung pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan dan tingkat saling ketergantungan dari orang-orang dalam berbagai unit yang melaksanakan tugas itu. Koordinasi dapat juga terjadi pada orang-orang atau badan yang bekerja secara terpisah tetapi mempunyai tujuan yang sama dalam pencapaian tujuan salah satu contohnya adalah Bagaimana Bentuk Koordinasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas dalam Penanggulangan bencana yang terjadi di daerah, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011, salah satu yang diterapkan adalah adanya koordinasi yang baik dengan instansi yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana Banjir tersebut, dimana koordinasi pada objek kegiatan tertentu agar berjalan dengan baik sesuai tujuan yang sudah direncanakan.

Menurut Sutarto (1992 : 31) adapun manfaat koordinasi yang baik dalam suatu organisasi itu antara lain:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan suatu pendapat bahwa suatu organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
2. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antara satuan organisasi atau antar pejabat.
3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya peristiwa atau waktu menunggu yang memakan waktu lama.
4. Dengan koordiansi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi.
5. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi.
6. Dengan koordinasi dapat menimbulkan kesadaran antar pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
7. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran antara pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama.
8. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat.
9. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya langkah antar pejabat.
10. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat.
11. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.

Dalam pelakasanakan koordinasi suatu organisasi harus memeiliki pedoman seperti:

1. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian yang bergerak sendiri-sendiri.
2. Koordinasi harus terpadu, keterpaduan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi.
3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkain kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
4. Wujud koordinasi harus menunjukkan pendekatan multi institusional, dengan wujud saling memberi informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpang tindih tugas yang satu dangan tugas yang lainnya.

Dengan adanya pedoman dalam melaksanakan koordinasi diharapkan koordinasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam

pelaksanaan koordinasi Harold Koonzt, dan Cyril O'donnel yang menyatakan bahwa koordiansi yang baik dapat dilihat dari:

1. Kerjasama
2. Komunikasi yang baik
3. Pertemuan rapat
4. Pembagian tugas

Maka untuk membahas bentuk koordiansi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, penulis akan menjelaskan dari masing-masing indikator dari variabel koordiansi yang baik.

3.1.1. Kerjasama BPBD dan Dinas Sosial

Kerjasama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lainya yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerja sama pada dasarnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya kerjasama itu harus memperhatikan prinsip-prinsip yaitu:

- a. Hubungan kerjasama saling pengertian
- b. Tindakan-tindakan yang selaras
- c. Kesatuan tindakan

Dalam kerjasama dibutuhkan adanya saling pengertian dari personil yang bertugas maupun antar instansi yang terkait. Dalam penanganan banjir di Kabupaten Kampar khususnya banjir yang terjadi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu pada Tahun 2011 diperlukan kerjasama yang baik

3.1.2. Komunikasi BPBD dan Dinas Sosial

Koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerjasama ini terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Cara komunikasi haruslah dilakukan sebagai sesuatu yang harus ada dalam setiap kegiatan, sehingga setiap informasi yang memerlukan koordinasi dapat disalurkan. Banyak informasi yang diperlukan untuk bahan koordinasi dapat disalurkan melalui kertas kerja yang berjalan melalui seluruh rute dari suatu bagian ke bagian lainya.

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampain informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampain. Sehingga informasi dapat dipahami oleh pihak kedua, serta saling memiliki kesamaan arti lewat tranmisi pesan secara simbolik. Sebagai suatu proses penyampain informasi, individu yang terlibat dalam kegiatan komunikasi khususnya komunikator perlu merancang dan menyajikan informasi yang benar dan tepat sesuai dengan pengaturan informasi, dan informasi tersebut disajikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan tingkat penerimaan lawan komunikasi. Adapun komunikasi yang baik dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan yang baik secara internal dan eksternal
- b. Adanya komunikasi seacara langsung maupun tidak langsung
- c. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung komunikasi

3.1.3. Pertemuan rapat

Rapat adalah suatu pertemuan organisasi resmi dengan tata tertib yang agak mengikat, sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut bersifat mengikat. Pertemuan atau rapat antara instansi-instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir berfungsi untuk membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi agar hubungan antara pimpinan, regu, anggota maupun tim agar dapat terjalin hubungan yang terkait dan jelas secara keseluruhan, sehingga dapat mendorong terjadinya koordinasi yang baik, selain itu adanya pertemuan atau rapat juga dapat mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun pertemuan rapat yang baik dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Adanya pertemuan jadwal dan terencana
- b. Memecahkan masalah dan mengevaluasi kegiatan
- c. Adanya rapat koordinasi sebelum melakukan penanganan dilapangan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai indikator melakukan pertemuan rapat-rapat.

3.1.4. Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan pemecahan tugas sedemikian rupa sehingga seluruh dinas/instansi terkait bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mereka laksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian tugas harus mengarah kepada keadilan yang mencerminkan distribusi yang relevan untuk menerima penghargaan dan keputusan dimana dalam hal ini dapat mempengaruhi penampilan percaya diri dan kreatifitas kerja.

Idealnya pembagian tugas dalam suatu organisasi didasarkan kepada prinsip pemerataan, artinya adalah ideal sekali apabila tugas-tugas yang harus dilakukan oleh satuan-satuan kerja dibagi sedemikian rupa sehingga beban tugas menjadi lebih ringan dan dapat merata. Adapun pembagian tugas yang baik dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Adapun pembagian tugas yang jelas, maksudnya adalah terdapat pedoman mengenai perincian dan uraian tugas masing-masing.
- b. Penempatan pegawai sesuai dengan bidang kemampuannya.
- c. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap kewajiban yang berikutnya.

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana banjir di kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011 antara lain sebagai berikut:

3.2.1. Tidak Adanya Program Kerja Bersama

Pelaksanaan koordinasi yang paling utama adalah program kerja bersama yang disusun dimana dalam program kerja bersama telah digambarkan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi dan siapa yang menjadi sasaran kegiatan ini. Rencana kerja yang ada didalam koordinasi biasanya di proses melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan sehingga nantinya akan dicapai dalam pelaksanaan koordinasinya dalam perencanaan kerja yang akan dikoordinasikan diperlukan adanya penjabaran mengenai sasaran yang dikoordinasikan.

Salah satu faktor terpenting agar terlaksananya koordinasi dengan baik adalah harus ada perumusan kerja bersama antara instansi/lembaga yang menjadi anggota dalam satuan penanggulangan bencana banjir.

Sesungguhnya program kerja bersama sangat penting artinya bagi pelaksanaan fungsi koordinasi kegiatan antar instansi terkait yaitu sebagai pedoman, acuan dan arah kegiatan dari masing-masing instansi yang terlibat kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini belum memiliki turap yang merupakan acuan dan pedoman. Belum terlaksananya turap yang bisa menahan luapan air ke rumah-rumah warga, ini merupakan masalah serius dalam permasalahan banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Kampar sudah menganggarkan untuk pembuatan turap di Kecamatan Kampar Kiri Hulu namun saat ini belum terlaksana.

3.2.2. Sulit Melakukan Rapat Atau Pertemuan

Dalam pelaksanaan koordinasi, persoalan rapat atau pertemuan merupakan faktor terpenting pula, karena dalam pertemuan atau rapat antar instansi yang terkait akan ditemukan persoalan-persoalan penanggulangan bencana, kemudian dalam pertemuan tersebut dapat dicari pemecahan masalahnya. Namun pertemuan ini jarang dilakukan karena masing-masing pihak yang terkait waktu kerjanya disibukan dengan tugas dan fungsinya yang mereka anggap lebih penting.

Padahal dengan melakukan pertemuan atau rapat, setiap pihak dapat mengemukakan beberapa kendala dan bersama-sama akan dibahas jalan keluar atau solusi untuk memecahkan hal tersebut, biasanya semakin banyak pertemuan yang dilakukan maka akan semakin memperlancar kegiatan yang diprogramkan.

Dalam hal pelaksanaan fungsi koordinasi, Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sebagai aktor utama seharusnya melaksanakan pertemuan-pertemuan berupa rapat koordinasi kepada seluruh instansi terkait dalam penanggulangan bencana sekurang-kurangnya 3 kali dalam satu Tahun. Namun dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar hanya melakukan pertemuan atau rapat koordinasi sepanjang tahun 2011 hanya 1 kali sepanjang tahun tersebut, dan rapat koordinasi dilakukan kapan saat di perlukan dan pada saat terjadinya bencana.

3.2.3. Intensitas Komunikasi Yang Rendah

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah, komunikasi

pengertiannya adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah tingkah lakunya atau melaksanakan informasi yang disampaikan tersebut. Dari hasil komunikasi inilah seseorang koordinator dapat melihat apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan.

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan koordinasi, tanpa adanya komunikasi koordinasi tidak akan berjalan dengan baik, komunikasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan baik hal ini dikarenakan instansi dan lembaga yang terkait berjalan masing-masing

Selain itu dalam penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu pada Tahun 2011 yang lalu, belum terselenggaranya komunikasi yang baik sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tidak hanya sebatas pada saat bencana itu terjadi, akan tetapi yang terpenting pasca bencana tersebut seharusnya ada tindakan yang jelas sehingga masyarakat yang berada pada hamparan sungai tersebut bisa aman dari ancaman bencana banjir sewaktu tiba-tiba, masyarakat yang berada jauh dari ibu kota kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni desa yang terdampak tersebut masyarakat yang berada di Desa subayang jaya yang juga terdampak dari bencana banjir masih merasakan perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar yang khususnya instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai koordinasi penanggulangan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Pada Tahun 2011, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh tidak adanya program kerja bersama, sulitnya melakukan rapat atau pertemuan dan intensitas komunikasi yang rendah.
2. Pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, harusnya Pemerintah kabupaten kampar yang pada khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir tersebut belum adanya tindak lanjut dari bencana banjir itu terjadi, hanya sebatas pada saat bencana itu saja.

2. Saran

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda, dan dampak psikologis. Dalam hal ini masalah banjir merupakan salah satu bencana besar yang tidak bisa dihilangkan begitu saja, namun dapat diminimalisir dampak yang diakibatkan banjir itu sendiri. Saran yang dianggap perlu untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kampar khususnya dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kampar Khususnya Instansi yang terkait dan semua aktor secara menyeluruh untuk saling bekerjasama dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan baik.
2. Bencana banjir merupakan masalah klasik yang selalu terjadi setiap tahunnya, untuk Pemerintah Kabupaten Kampar lebih serius dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sehingga banjir yang terjadi bisa di minimalisir.
3. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu hendaknya melakukan koordinasi dengan baik sehingga dalam pelaksanaan koordinasi tersebut tidak hanya sebatas pasbencana terjadi akan tetapi pasca bencana itu terjadi, dan Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kondisi Daerah yang rawan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Melayu S.P. 2006. *Managemen, Dasar, Pengertian, Dan Masalah. (Edisirevisi I Cetakankeenam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2007. *Managemen, Dasar, Pengertian, Dan Masalah (Edisirevisi I Cetakankeenam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadiningrat, Soewarno. 2000. *Pengantar Ilmu dan Administrasi Manajemen*. PT Gunung Agung, Yogyakarta.
- Handoko, T Hani. 2003. *Managemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPF
- Koonzt, Harold dan CryiL O'Donnel (1998). *Managemen*. Erlangga, Jakarta.
- Manulung, M. 2008. *Dasar-Dasar Managemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi suatu Tinjaun Teoritis*. Cv. Mandar Maju, Bandung: PT. Penja Rosdakarya.
- Suganda, Dann. 1994. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Bandung: Intermedia.
- Syafiie, Inu K. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Syafiie, Inu K. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. PT Pertja, Jakarta.

Syafrudin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Aditiya Bakti.

Soetarto, 1992. *Dasar-dasar kepemimpinan Administrasi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suryaningrat, Bayu. 1989. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Nogi Heseel, Tangkilisan. 2004. *Kebijakan Dan Managemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Moeleng J Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya : Bandung.

Dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penaggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010, Tentang Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.